MASYARAKAT INDONESIA DALAM SERIBU WAJAH KAPITALISME

Asma Luthfi
Jurusan Sosiologi dan Antropologi FIS UNNES

Abstract

Basically, the existing capitalist system in Indonesia today is the economic system that has been practiced for a long time. Throughout its history, there are several forms of the capitalist system that has been practiced in Indonesia. The first is the colonial capitalist system which lasted from the Dutch colonial period until Indonesia's independence. The second is the bureaucratic capitalism that took place during the New Order period. The third is the global capitalist system that emerges when neo-liberalism policies are applied to the Third-World countries, including Indonesia. Such capitalist systems in their developments give either some implications or impacts to the social life of the people in Indonesia.

Key words: Indonesia people's, capitalist system

PENDAHULUAN

Semenjak terkena krisis moneter pada akhir tahun 1997, para pakar ekonomi, politik, dan sosial serempak bertanya; "ada apa dengan sistem ekonomi di Indonesia"? Thailand, Malaysia, dan Singapura sesama anggota ASEAN yang waktu itu juga terkena krisis moneter dalam waktu yang hampir bersamaan, tidak perlu memerlukan waktu yang lama untuk kembali menstabilkan ekonomi mereka. Di Indonesia, krisis moneter ini seolah tak pernah berakhir hingga krisis keuangan global kembali muncul. Krisis keuangan global yang awalnya melanda Amerika Serikat pada awal tahun 2008 lalu berdampak buruk bagi keuangan dunia, termasuk di Indonesia.

Ada banyak asumsi dan analisis yang mengemuka terkait dengan kondisi perekonomian Indonesia yang tak kunjung stabil. Mulai dari analisis tentang fundamen ekonomi bangsa yang tidak kuat, hingga pada mentalitas orang-orang Indonesia yang sarat KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang turut memperparah sistem ekonomi kita. Semua tentu memiliki fakta dan bukti yang cukup kuat. Akan tetapi sejatinya, hal yang tidak kalah pentingnya adalah melihat sistem kapitalisme yang pada saat krisis ekonomi ini muncul, tengah dipraktikkan secara kuat dan massif oleh negara-negara maju. Di Indonesia, sistem kapitalisme ini ternyata telah beroperasi seiring dengan perkembangan pemerintahan , dengan wajah yang berbeda.

WAJAH KAPITALISME DI INDONESIA

Bericara tentang kapitalisme, maka sangat erat kaitannya dengan sistem ekonomi dengan kepemilikan sarana-sarana produksi yang terkonsentrasi di tangan kelompok tertentu atau kelas sosial yang terdiri dari berbagai rupa struktur produksi. Melalui jaringan struktur politiknya di berbagai negara, sistem ekonomi kapitalis ini pada akhirnya mampu berkembang pesat dan menyebar ke seluruh penjuru dunia, mengeksploitasi dan memusnahkan sistem-sistem lokal dalam masyarakat (Sowarno dan Alvin Y.SO, 1994:175). Sistem kapitalisme seperti ini menurut McVey (1998:3), merupakan sebuah sistem yang memanfaatkan sarana produksi untuk menciptakan laba dan sebagian dari laba tersebut diinvestasikan kembali untuk memperbesar kemampuan menghasilkan laba.

Jika dilihat dari sejarah perkembangan masyarakat Indonesia, sistem kapitalisme ini sesungguhnya bukanlah barang baru, tetapi ia telah ada dan berkembang sejak Belanda menanamkan praktik-praktik imperialismenya di bumi Indonesia. Tentu saja, bentuk kapitalisme tersebut tidaklah sama dengan sistem kapitalisme yang sekarang ini tengah berlangsung di Indonesia. Praktik-praktik kapitalisme Belanda yang diterapkan di Indonesia sangat sarat dengan penjajahan dan kolonialisme. Ketika Indonesia merdeka, ternyata praktik-praktik kapitalisme ini tidak ikut hengkang dari bumi pertiwi, tetapi justru menemukan wajah barunya lewat kemasan *developmentalisme* yang kala itu diusung oleh Orde Baru. Bahkan setelah rezim Orde Baru tumbang dan pemerintah melakukan reformasi di berbagai bidang, kapiatalisme tersebut tetap saja berjaya dan bercokol di bumi Indonesia lewat neo-liberalisme dan pasar bebas.

Untuk melihat perkembangan kapitalisme di Indonesia, maka akan diuraikan kedalam 3 (tiga) fase kesejarahan yang sangat penting dan memiliki karakteristik kapitalisme yang berbeda.

KAPITALISME ERA VOC DAN KOLONIALISME BELANDA

Kedatangan bangsa Belanda di Nusantara diawali dengan kedatangan *Verenigde Oost-Indishe Compagnie* (VOC) yakni suatu kongsi dagang monopolistis yang dipersenjatai, yang mempunyai kedaulatan atas wilayah-wilayah tertentu yang diperolehnya dengan merampas. Penaklukan-penaklukan imperialistik-kolonialistik yang dijalankan oleh VOC-pemerintah kolonial Belanda sangat didasari oleh pelbagai motif, sebagaimana yang dikatakan J. Verkuyl (2002:36-40), mencakup: *pertama*, merkantil ekonomi; *kedua*, motif teokratis; *ketiga*, motif kultural; dan *keempat*, motif imperial. Atas dasar motif-motif inilah, yang kemudian melahirkan hasrat yang begitu besar untuk melakukan monopoli dalam bidang ekonomi-perdagangan dan pada akhirnya melakukan penaklukan di berbagai daerah di Nusantara.

Monopoli ekonomi serta penaklukan VOC-pemerintah Belanda terhadap wilayah-wilayah di Nusantara inilah yang sesungguhnya menjadi awal dari lahir dan berkembangnya praktik kapitalisme di Indonesia. Monopoli ekonomi yang dilakukan VOC ini dilakukan antara lain dengan cara mempermainkan *kurs picis* dengan mengontrol bahan bakunya dan memaksakan agar transaksi yang dilakukan hanya dengan perdagangan langsung dengan VOC. Caranya adalah dengan memberlakukan sistem moneter ganda, sehingga dalam hal ini VOC menjadi pihak yang sangat diuntungkan. Akan tetapi yang paling menderita akibat permainan kurs mata uang tersebut adalah para petani, khususnya petani merica beserta seluruh perangkat ekonomi pribumi (Supriatma, 1996:70).

Setelah VOC bangkrut dan dibubarkan pada tahun 1679, kekuasaan terhadap Hindia Belanda kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan langsung dari pemerintahan kolonial Belanda. Ketika pemerintahan Kolonial Belanda berlangsung, sistem kapitalisme yang diberlakukan pada Hindia Belanda tidak lepas dari kondisi perekonomian dan pengaruh kapitalisme yang sedang berkembang di Eropa dan negeri Belanda saat itu.

Pada paruh pertama abad XIX, percepatan pertumbuhan ekonomi Belanda mengalami peningkatan yang cukup pesat. Aktivitas investasi berlangsung dinamis dan usaha-usaha berskala raksasa bermunculan. Sektor perdagangan dan jasa juga mengalami kemajuan mengesankan. Lembaga-lembaga keuangan didirikan untuk menjaga kelangsungan pendanaan usaha-usaha dihampir semua sektor. Ini semua bermuara pada pergeseran kapitalisme Belanda, dari kapitalisme agraris yang merkantilis menjadi kapitalisme industrial. Basis akumulasi kapital tidak lagi diletakkan di sektor pertanian, tetapi sudah digeser ke sektor industri. Kekuasaan modal dan politik pun tidak lagi berada di tangan negara dan segelinitr tuan-tuan tanah, tetapi terkonsentrasi di tangan golongan borjuasi. Setelah memperoleh kemapanan ekonomi, golongan borjuasi ini mulai berfikir untuk meluaskan investasi kapitalnya ke tanah jajahan, utamanya ke Hindia Belanda.

Secara periodik, perkembangan kapitalisme Belanda di Hindia Belanda dapat dilihat dari kurun waktu 1830-1850 dan periode 1850-1870. Pada periode 1830-1850, kapitalisme mulai berkembang di negeri Belanda secara mengesankan atas bantuan finansial dari hasil tanam paksa. Sementara periode 1850-1870, perkembangan kapitalisme Belanda sudah mendekati kematangan sebagai negara dengan kapitalisme industrial-finansial (Simarmata, 2002:33). Pada periode inilah tanaman tebu, kopi, teh, dan pohon kina dikembangkan di Jawa dan tembakau di Deli. Perusahaan-perusahaan swasta dapat menyewa sawah-sawah yang beririgasi dari pemilik bangsa Indonesia untuk penanaman tebu secara bergantian dengan penanaman padi oleh penduduk pribumi. Akan tetapi proses ini berakibat pada semakin melemahnya kepemilikan tanah penduduk pribumi karena lahannya menjadi penting bagi penanaman tebu bagi industri pemerintah kolonial (Wertheim, 1999:68). Proses kapitalisasi oleh Pemerintah Belanda ini berlangsung hingga pecahnya perang Dunia II yang menandai berakhirnya kekuasaan Belanda di Indonesia.

KAPITALISME ERA ORDE BARU

Pada era Orde Baru, kapitalisme ditandai dengan konsep pembangunan (*developmentalism*) dan modernisasi yang sangat gencar diterapkan di Indonesia. Developmentalisme yang juga secara serta merta dianut oleh mayoritas negara dunia ketiga, diidentikkan dengan gerakan langkah demi langkah menuju *higher modernity*. Modernitas di sini merefleksikan pada bentuk perkembangan dan kemajuan teknologi dan ekonomi seperti yang dialami oleh negara-negara industri. Konsep pembangunan ini kemudian ditafsirkan dan dipahami oleh negera Dunia Ketiga sebagai *general improvement in the standard of living* (Faqih, 2001: 202).

Kapitalisme era Orde Baru, peran negara sangat dominan dalam mengatur dan mengontrol mekanisme pasar atas nama kepentingan rakyat. Menurut Kunio (1990:23), kapitalisme Asia Tenggara adalah *Ersatz Capitalism.* Bentuk kapitalisme seperti ini berakibat pada perkembangan kapitalisme yang tidak dinamis karena campur tangan negara yang begitu signifikan dan hanya menghasilkan kapitalisme yang berwatak eksploitatif dan tidak manusiawi. Tidak memberi cukup ruang bagi berkembang sistem politik yang demokratis.

Kasus Indonesia, negara berperan sebagai institusi sentral yang menggerakkan pembanguan dengan cara imperatif, disamping memiliki otoritas yang besar untuk mensukseskan tujuan industrialisasi. Lebih dari itu, kuatnya posisi negara juga didukung oleh adanya asumsi yang mengindikasikan bahwa institusi negara memiliki hak istimewa dengan menciptakan, seperti yang diistilahkan Muhaimin sebagai 'rente ekonomi', baik dalam bentuk subsidi insentif maupun proteksi (Muhaimin, 1995:31). Di sini, kapitalisme global melakukan reposisi dengan memakai negara sebagai instrumen yang dapat mengendalikan pasar (Aditya, 2004:11). Hal ini kemudian melahirkan hubungan antar negara, aparatur negara dan pemilik modal seringkali terjalin secara kolutif, sehingga mengakibatkan distorsi ekonomi.

Dasar Modernisasi dan *Developmentalism* yang dirancang oleh kaum teknokrat developmentalis yang pro-pasar, dan begitu kuatnya peran negara serta aparatur negara dalam menentukan kebijakan pasar, maka kapitalisme era Orde Baru juga tercipta lewat kapiatalisme birokrasi yang sanagat ketat. Mekanisme birokrasi yang sengaja diciptakan secara hirarkhis, sentralistis, intervensi dan regulasi, lebih dimaksudkan untuk membuat stabilitas politik, memperkuat basis material negara dan untuk memelihara status quo. Mekanisme ini terus berputar, yang diikuti dengan akumulasi kapital serta alokasi sumber daya pada masyarakat lewat jalur kebijakan publik, sehingga legitimasi rezim dimata rakyatnya semakin mantap.

Mengutip istilah Richard Robison tentang birokrasi *patrimonial*, maka kapitalisme birokrasi yang berkembang di Indonesia adalah produk birokrasi *patrimonial* (Eko, 1996: 24). Sebab tidak ada pemisahan yang jelas antara fungsi produksi dan kepentingan pribadi. Kapitalisme birokrasi di Indonesia tercipta melalui kombinasi antara jabatan birokrasi dan kegiatan ekonomi, bersifat personal, informal dan secara tidak langsung dengan boneka-boneka atau klien-klien yang bergantung. Ia menunjukkan hubungan antara bisnis pribadi dengan administrasi negara. Ringkasnya, Kebijakan pasar dalam era Orde Baru ini sangat ditentukan oleh negara dan aparatur negara.

Namun pada tahun 1980an, kebijakan developmentalisme yang diusung pemerintah Orde Baru, rupanya gagal menjawab krisis ekonomi akibat *oil boom* yang mendorong jatuhnya harga minyak dan kemudian mengganggu stabilitas ekonomi dunia. Teori-teori ekonomi lama kemudian direvivalisasi lagi, sehingga melahirkan sebuah kebijakan baru yang dikenal dengan neo-liberalisme (Aditya, 2004:13).

KAPITALISME ERA PASAR GLOBAL DAN GLOBALISASI

Kapitalisme era Pasar Global dan lahirnya globalisasi ini ditandai dengan ditandatanganinya GATT (*General Agreement on Tariffs and Trade*) tanggal 15 April 1994 di Marrakesh Maroko (Wibisono, 1994:76) dan masuknya Indonesia pada keanggotaan WTO, APEC dan AFTA. Ini berati bahwa sebuah pasar perdagangan dunia yang bebas dari intervensi pemerintah manapun akan terbuka lebar. Lebih lanjut, globalisasi ini pada dasarnya merupakan proses pesatnya perkembangan kapitalisme yang ditandai dengan globalisasi pasar, investasi dan proses produksi dari perusahaan-perusahaan Transnasional.

Pada tahun 1995, WTO didirikan sebagai suatu organisasi pengawasan perdagangan dan kontrol perdagangan dunia. Dalam perjalanannya, WTO menjadi salah satu aktor dari mekanisme globalisasi yang terpenting sekaligus menjadi arena forum perundingan antar perdagangan. Akan tetapi, dibalik WTO ini, aktor-aktor yang sesungguhnya paling berkuasa adalah Perusahaan-perusahaan Transnasional (TNCs) dan *International Financial Intitutions* (IFIs).

Konsep dan mekanisme globalisasi sebagai proses pengintegrasian ekonomi nasional ke dalam sistem ekonomi dunia diperankan oleh tiga aktor utamanya, yakni TNCs yang dengan dukungan negara-negara yang diuntungkan membentuk suatu dewan perserikatan perdagangan global yang dikenal dengan WTO. WTO ini sekaligus merupakan aktor kedua dari globalisasi. Aktor Globalisasi yang ketiga adalah lembaga keuangan global, yakni *World Bank* dan IMF (Faqih, 2002:203). Lembaga-lembaga internasioanl inilah yang dengan leluasa memberikan utang luar negeri dengan berkedok bantuan kepada Indonesia untuk membangun. Akan tetapi pada akhirnya mengungkung Indonesia dalam kubangan utang luar negeri yang seakan tidak bisa terlunasi .

Alih-alih memberikan kemakmuran dan jalan keluar bagi problem ekonomi dan pembangunan, kebijakan globalisasi ekonomi yang diperankan oleh Bank Dunia, IMF dan WTO ini, justru menciptakan kemiskinan. Di Indonesia, kebijakan ekonomi Bank Dunia dan IMF ini dirancang dalam bentuk *Structural Adjustment Programmes* (SAPs) atau program penyesuaian struktural. Melalui SAPs inilah seluruh kebijakan perekonomian nasional ditinjau ulang agar sesuai dengan kebijakan semua negara lainnya, dan yang paling penting adalah agar sejalan dengan ideologi perdagangan bebas. Program-program SAPs antara lain: (1) Penghapusan tarif-tarif yang membantu industri-industri kecil lokal agar tetap mampu berhadapan dengan perusahaan-perusahaan besar global. (2) Penghapusan berbagai aturan dalam negeri yang mungkin dapat menghambat atau terlalu banyak mengatur masuknya investasi luar negeri. (3) Penghapusan kontrol harga – bahkan yang berkenaan dengan kebutuhan pokok seperti pangan dan air sekalipun - tetapi secara tidak adil mewajibkan pemberlakuan kontrol atas upah. (4) Pengurangan secara drastis berbagai pelayanan sosial dan badan-badan yang menjalankannya. (5) Penghancuran secara agresif atas program-program rakyat. (6) Perubahan yang dipaksakan secara cepat atas perekonomian dalam negeri untuk menekankan produksi ekspor (*The International Forum on Globalization,* 2003:11)

Secara umum, agenda IMF, termasuk WTO dan Bank Dunia mengandung tiga point utama, *Pertama*, liberalisasi ekonomi yang diarahkan untuk mengurangi campur tangan negara dalam ekonomi dan pasar. *Kedua*, privatisasi yang ditargetkan ke perusahaan-perusahaan milik negara. *Ketiga,* deregulasi ekonomi yang menempatkan peran negara hanya sebagai regulator atau pengawas (Aditya, 2004:14). Inilah yang disebut dengan kebijakan neo-liberalisme, yang menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi hanya akan berkembang jika tidak ada kontrol dari negara. Di sini, fungsi sosial ekonomi sebagai bagian untuk kesejahteraan sosial menjadi terabaikan, sebab yang menempati posisi yang terpenting adalah akumulasi laba privat. Jika demikian, maka kedaulatan yang sepenuhnya berada di tangan rakyat sebagaimana yang secara jelas tertuang dalam UUD 1945, tinggal menjadi rangkaian teks semata yang hampa makna.

DAMPAK KAPITALISME TERHADAP DINAMIKA SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT INDONESIA

Perkembangan Kapitalisme dari masa ke masa yang terjadi di Indonesia memang tidak pernah usai. Meskipun telah melewati beberapa fase kesejarahan yang cukup panjang, tetapi kapitalisme ini tetap saja eksis bahkan memiliki banyak wajah sesuai dengan konteksnya. Di sisi lain, praktik-praktik kapitalisme yang berkembang ini bukan tidak mungkin membawa dampak dan pengaruh bagi dinamika sosial budaya masyarakat Indonesia.

Pada Kapitalisme era VOC dan Pemerintahan Belanda, dampak sosial budaya yang sangat dirasakan masyarakat Indonesia saat itu adalah kolonialisme dan imperialisme selama 3,5 abad lamanya. Sistem tanam paksa yang dilakukan pemerintah Kolonial Belanda untuk meningkatkan perekonomian negerinya telah menguras tenaga dan kekayaan alam Bangsa Indonesia.

Selain itu, birokrasi negara menjadi sangat otoriter dan penduduk pribumi mengalami degradasi kehidupan sosial ekonomi. Sistem birokrasi yang konservatif yang dipraktikkan turut mempengaruhi cara pandang masyarakat Indonesia tentang pelaksanaan mekanisme birokrasi. Mekanisme ini telah melahirkan otoriterisme birokrasi *pangreh praja* (Simarmata, 2002:194). Feodalisasi mekanisme hubungan pejabat-pejabat pribumi dengan penduduk pribumi yang ditandai dengan pemberian tanah jabatan dan pemakaian tenaga rakyat untuk kerja-kerja wajib. Feodalisme kekuasaan politik ini juga menjadikan priyayi-priyayi sebagai agen dari sebuah pusat pemerasan sehingga jarak antara mereka dan para petani semakin melebar. Lewat sistem ini, negara dibiarkan mengintervensi sangat kuat dan ketat pada aktivitas ekonomi masyarakat, sehingga melahirkan biokrasi feodal yang berfungsi mengatur, bukan melayani masyarakat.

Pada era Orde Baru, kapitalisme yang berkembang adalah kapitalisme birokrasi yang berbasis pada modernisasi dan *develompentalism*. Negara secara dominan mengatur lalu lintas ekonomi dan posisi inilah yang menguntungkan '*abdi negara*' atau pejabat pemerintahan untuk mengeruk kekayaan pribadi. Akibatnya, pemerataan ekonomi yang diusung, tidaklah seideal jargonnya, sebab keberpihakan pemerintah lebih pada sistem konglomerasi, baik dari pejabat negara maupun kolega-kolega pejabat negara tersebut.

Era ini juga ditandai dengan naiknya ABRI ke panggung politik yang secara serta merta juga menarik ABRI ke dalam wilayah bisnis. Hal ini menimbulkan suatu sistem kapitalisme yang bercorak militer. Kontrol negara pun menjadi sangat kuat dan represif yang berakibat pada lemahnya kontrol *civil society* dalam mempenagruhi kebijakan negara. Modal terkonsentrasi hanya pada satu arus saja. Ketika penguasa tidak mampu lagi mendistribusikan sumber daya material, baik di kalangan elit maupun massa, maka yang terjadi adalah pergolakan struktural. Akibatnya, konflik antar elit kian meningkat dan merambah pada desakan kelas menengah dan kebrutalan massa (Eko, 1996:36). Kapitalisme yang berbasis pada *develompentalism* ini akhirnya membawa pada krisis ekonomi moneter yang berkepanjangan, yang secara sosial berdampak pada banyaknya pengangguran, kemiskinan, kelaparan, kerusuhan, penjarahan, konflik antar agama, dan konflik antar etnis.

Sementara pada era kapitalisme global, intervensi modal-modal asing sangat kuat dalam memainkan sistem perekonomian dunia. Negara tidak lagi menjadi pengontrol utama, tetapi diperlukan hanya ketika lembaga donor tersebut membutuhkan perannya sebagai penyedia infrastruktur, penjamin penegakan hukum, dan penjamin keamanan berinvestasi (Wibowo, 2003:281). Posisi negara kian melemah, bahkan hanya menjadi mediator bagi keberlangsungan praktik ekonomi neoliberal di negaranya.

Kebijakan neoliberalisme yang seolah 'dipaksakan' oleh negara-negara maju kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia membawa beberapa konsekuensi logis. Peran negara yang seharusnya berfungsi untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya, menjadi kian melemah dan tidak bisa lagi menentukan kebijakan ekonominya secara mandiri. Alhasil, negara hanya menjadi mediator berupa penyedia infrastruktur, penjamin penegakan hukum, dan penjamin keamanan bagi investor asing dan aktor-aktor neoliberalisme lainnya.

Lewat SAPs sebagai senjata pamungkas yang diperuntukkan bagi negara-negara berkembang, IMF, *World Bank*, dan WTO dengan leluasa mengatur kebijakan-kebijakan di Indonesia. Pada sektor pelayanan-pelayanan umum misalnya, Bank Dunia dan IMF mewajibkan pemerintah untuk mengurangi dan menghapuskan secara drastis jasa-jasa pelayanan umum yang pokok di berbagai bidang, seperti kesehatan, air, pendidikan, transportasi dan pelatihan kerja. Pemerintah seringkali diharuskan untuk memprivatisasi jasa-jasa pelayanan umum tersebut. Selain itu, peraturan globalisasi juga mempersulit pemerintah dalam memberlakukan struktur-

struktur pajak bagi aktivitas korporasi besar, yang pada akhirnya berdampak pada semakin berkurangnya jasa pelayan pemerintah (*The International Forum on Globalization*, 2001:49). Berkurangnya subsidi pemerintah atas pelayanan-pelayanan umum ini berakibat pada mahalnya biaya kesehatan, pendidikan, dan transportasi.

Pada sektor pertanian, lewat SAPs, pemerintah diharuskan untuk melakukan penyesuaian kebijakan, yakni program penyesuaian struktural yang berdampak pada produksi yang berorientasi ekspor pada bidang pertanian dan mata pencaharian rakyat lainnya. Akibatnya, rakyat yang selama ini mengenal pola pertanian subsistensi (dapat menghidupi diri sendiri), dipaksa untuk melakukan over produksi untuk kebutuhan ekspor. Dari sinilah muncul istilah revolusi hijau, yakni modernisasi pertanian, khususnya tanaman pangan yang mengandalkan *asupan* kimiawi dan biologi, selain prasyarat kelancaran irigasi, ke dalam kultur bercocok tanam tanaman pangan pokok, khusunya padi di Indonesia. (Wahono, 2003:227). Pada awalnya, program revolusi hijau ini dapat memperlihatkan keberhasilannya. Dengan pemilihan bibit unggul dan penggunaan pupuk buatan, insektisida, herbisida, proses pembimbingan, bahkan pada distribusi dan bantuan dari pemerintah, produksi padi dapat mencapai angka yang fantastik. Akan tetapi ini tidak berlangsung lama karena ternyata dengan revolusi hijau ini petani tidak bisa membayar hampir semua *asupan* tersebut. Selain itu, lahan persawahan mereka akhirnya menjadi sangat tergantung pada *asupan* kimiawi dan biologis tadi, sehingga ketika petani ingin kembali kepada budaya bercocok tanam tradisional, lahan menjadi tidak lagi subur untuk dikelola. Oleh karena itu, meski diantara petani ada yang memiliki lahan pertanian, tetapi karena tidak mampu menghasilkan, maka pada akhirnya lahan tersebut ditinggalkan. Petani kemudian mencari pekerjaan lain di luar daerah mereka, bahkan menjadi buruh migran di luar negeri.

Kondisi yang sama juga terjadi pada sektor pertambakan. Pada awal tahun 1980an, kebijakan ekspor udang windu menjadi prioritas pemerintah menyusul permintaan udang windu dari Jepang semakin meningkat. Oleh karena hasil tangkapan udang windu dari laut tidak dapat memenuhi target, maka dikembangkanlah sistem pertambakan yang intensif di berbagai daerah di tanah air. Kabupaten Maros di Propinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu lokasi utama pengembangan sistem pertambakan intensif tersebut. Banyak tambak-tambak tradisional milik warga yang kemudian dikelola dengan sistem pertambakan intensif. Bahkan untuk menambah areal tambak, beberapa lahan hutan mangrove pun diubah menjadi tambak. Hanya saja, sistem pertambakan intensif ini memerlukan dana yang tidak sedikit sehingga masyarakat lokal tidak mampu mengelolanya. Dengan kondisi yang demikian, lahan-lahan mereka akhirnya disewa ataupun dibeli oleh pengusaha besar yang biasanya datang dari Jakarta yang merupakan keluarga penguasa pada saat itu. Lahan ini kemudian dikelola oleh perusahaan Jepang dan Taiwan. Sementara masyarakat lokal hanya menjadi 'buruh' di tambak tersebut. Selama lebih dari sepuluh tahun, perusahaan ini beroperasi dengan pola pertambakan intensif dengan penggunaan teknologi yang modern dan *asupan* pupuk kimiawi. Intensifnya pemberian pupuk kimiawi menyebabkan lahan tersebut tidak lagi sesubur yang dulu, ditambah lagi dengan serangan virus pada benur (bibit udang) dan udang dewasa. Melihat gejala ini, maka perusahaan dan investornya pun mulai meninggalkan lokasi tersebut dengan keuntungan besar yang sudah dikantongi, tanpa pernah memperdulikan kondisi lahan pertambakan milik warga yang semakin kritis.

Implikasi kebijakan neoliberalisme ini juga berimbas pada usaha-usaha rakyat kecil pada bidang perdagangan. Kebijakan pemerintah yang kurang membatasi usaha-usaha dagang asing masuk, berinvestasi, dan berdagang di Indonesia menyebabkan usaha dagang asing tersebut tumbuh subur bak cendawan di musim hujan. Ini terjadi tidak hanya di kota besar, tetapi juga di pelosok desa sekalipun. Seperti kasus yang terjadi di Gunung Kidul, beberapa pedagang kelontong mengeluhkan penurunan penjualan karena banyaknya pelanggan yang 'lari' ke AlfaMart atau IndoMart yang menyuguhkan barang dagangan dengan fasilitas yang lengkap, seperti pendingin ruangan, sehingga pelanggan menjadi betah untuk berbelanja. Persoalan ini bukan sekedar perkara ketidaksiapan masyarakat untuk bersaing secara sehat, tetapi dengan kondisi yang serba terbatas, pemeritah semestinya memberikan payung kebijakan yang betul-betul melindungi usaha 'kecil' mereka.

Selain itu, program privatisasi berupa penjualan saham pemerintah di BUMN kepada pemodal perseorangan melalui pasar modal, yang membawa dampak pada peran negara yang terbatas dalam mengatur dan mengontrol perekonomian dalam negeri. Jika privatisasi ini dibiarkan dan seluruh BUMN diprivitasisi, maka perekonomian Indonesia layaknya hanya sebagai pelayan yang tidak memiliki posisi tawar sedikit pun dalam pengambilan kebijakan ekonomi dalam negeri.

PENUTUP

Perkembangan kapitalisme di Indonesia tidak bisa dilepaskan dari perubahan dan perkembangan ekonomi di dunia Barat. Sejak revolusi industri muncul, babak awal kapitalisme pun dimulai. Negara-negara barat saat itu saling berkompetisi untuk mendapatkan negara koloni sebagai *suplyer* sumber daya alam buruh yang murah untuk mendukung proses industri yang mereka galakkan. Seiring dengan kemerdekaan Negara jajahan termasuk Indonesia, kapitalisme dengan wajah kolonialisme pun surut. Indonesia lalu mengisi kemerdekaannya dengan jargon pembangunan (*develompentalisme*). Akan tetapi ternyata jargon inilah yang memuluskan masuk dan berkembanganya kapitalisme birokasi di Indonesia. Wajah baru dalam sistem kapitalisme yang berkembang di dunia ketiga.

Bentuk kapitalisme di Indonesia ternyata tidak *stagnan* sampai di sini, sebab perkembangan sistem kapitalisme di dunia Barat turut memoles wajah kapitalisme di Indonesia. Tatanan ekonomi global yang melahirkan globalisasi dan kebijakan neo-liberalisme memaksa dunia ketiga, termasuk Indonesia, untuk tunduk dan patuh terhadap kebijakan para pemegang modal. Dengan kedok pinjaman untuk pembangunan lewat WTO,*World Bank*, dan IMF, negara-negara maju dan perusahaan transnasional berhasil menancapkan kembali kukunya ke negara-negara dunia ketiga. Negara Barat kembali 'mendikte' dunia ketiga tanpa merasa didikte. Hal ini akibat sistem ekonomi yang canggih dan hegemonik. Barangkali inilah yang disebut dengan penjajahan jilid II, sebab meski berada dalam negara merdeka, tetapi seolah tidak bisa berdaulat dan menentukan sendiri nasib dan arah bangsanya secara mandiri.

DAFTAR RUJUKAN

Eko, Sutoro. 1996. Birokrasi, Modernisasi dan Kapitalisme Orde Baru dalam *PRISMA*. Vol 25, No.8 Agustus:24-36.

Fakih, Mansour. 2002. *Jalan Lain: Manifesto Intelektual Organik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.

_______. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan Insist Press.

Gonggong, Anhar. 2001. Perjumpaan Nusantara-Indonesia dengan Belanda: Dari VOC-Hindia Belanda sampai Republik dalam Kedutaan Besar Republik Indonesia, *VOC di Kepulauan Nusantara: Berdagang dan Menjajah*. Hlm. 36-40. Jakarta: Pustaka Pelajar.

Kunio, Yoshiha. 1990. *Kapitalisme Semu Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.